

BUDAYA KONSUMSI KAUM SANTRI DI TENGAH RUANG KOTA

M. Alie Humaedi

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan,
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI),
E-mail: m.alie.humaedi@lipi.go.id, dan aliehumaedi@yahoo.com

Abstract

The making image of cultural practices of santri in the City of Kudus is very unique; it is a mixture of the modern consumptive culture and traditional productive culture. The accommodative form of both cultures has influenced the symbols of traditional city, considered as the saint city, which has many religious meanings. Mall Kudus means not only as the centre of consumptive economy, but also as the cultural centre that tries to meet traditional and modern elements in their covers. Santri, then, becomes a group of people who enjoy best this condition. This article tries to answer the main question about the position of Mal Kudus in the process of the formation of consumptive culture of Santri. After collecting data by using interviews, observation, and documentation, and analyzing by using qualitative explanatory method, this research shows the relationship between the management of urban space and the formation of consumptive culture of santri. This conclusion is based on the aspect of the management of urban spaces, especially the building of Mall, which expressively creates the consumptive culture of the santri; even the traditional santri.

Key Words: *Consumptive Culture, City Symbol, Mal Kudus, Santri*

Abstrak

Pencitraan praktik kebudayaan santri di Kota Kudus sangat unik, yaitu campuran budaya konsumtif yang modern dengan budaya produktif yang tradisional. Bentuk akomodatif keduanya telah mempengaruhi simbol kota tradisional yang dianggap kota wali yang memiliki banyak makna keagamaan. Mal Kudus tidak semata dimaknai pusat ekonomi konsumtif, juga pusat budaya yang berusaha mempertemukan elemen tradisional dan elemen modern dalam bentuk perwujudannya. Kaum santrilah yang paling menikmati kondisi ini.

Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan mengenai posisi Mal Kudus dalam proses pembentukan budaya konsumsi kaum santri. Setelah pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis secara kualitatif eksplanatoris, penelitian ini menemukan hubungan antara pengelolaan ruang kota dengan pembentukan budaya konsumsi kaum

santri. Kesimpulan ini didasarkan pada aspek aspek pengelolaan ruang kota, khususnya pembangunan mal, yang secara ekspresif membentuk budaya konsumtif dari para santri yang dikenal tradisional sekalipun.

Kata kunci: *Budaya Konsumtif, Simbol Kota, Mal Kudus, Kaum Santri*

A. Pendahuluan

Apa yang terjadi ketika seorang atau sekelompok individu yang beridentitas santri berada dalam ruang budaya seperti mal? Dalam kacamata kajian budaya, pertanyaan seperti ini tetaplah menggelitik, terlebih ketika beberapa fenomenanya menggambarkan adanya pergulatan pola kapitalisme yang merebak, dan berbanding terbalik dengan mentalitas tradisionalisme kaum santri yang identik dengan internalisasi keagamaan. Termasuk di dalamnya pergulatan antara pola budaya konsumerisme dengan budaya “produktivitas”, yang hadir di tengah-tengah masyarakat yang sebelumnya dikenal sebagai masyarakat produksi. Bagaimana kemudian para pelaku budaya dan perantara budaya¹ merangkaikan pola-pola ini dalam tanda-tanda kebudayaan masyarakat setempat?

Selain soal tanda dan praktik kebudayaan di atas, mal juga dapat dilihat sebagai salah satu simbol kota yang sudah dipengaruhi gaya kapitalisme budaya.² Pada aspek arsitektur, terdapat kecenderungan kuat untuk melawan model arsitektur tradisional yang menghiasi kebanyakan bangunan yang berada di kota lama, seperti Kota Kudus. Mal Kudus yang ada di Kudus pun tidak terhindarkan dari upayanya untuk mengikuti gaya kapitalisme itu. Gaya arsitektur yang tegas dan formal, tertuang dalam aspek gubahan dekorasi, percampuran gaya, dan simulasi seni pop modern. Kata, gambar, pahatan, dan gemerlapnya lampu yang terletak di depan dan dinding mal berbeda dengan ketegasan tradisional yang melekat di Menara Kudus atau lainnya. Terlebih ketika Mal Kudus yang berada pada pusat kota dan berhadapan langsung dengan Masjid Jami Kudus. Susunan ruangnya telah menghasilkan *landscape* kekalahan tanda tradisionalisme oleh simbolisme budaya konsumsi yang hedonistik.

Untuk mendukung *landscape* di atas, beberapa *billboard* dan baliho berukuran besar secara sengaja dipajang di seputar jalan Simpang Tujuh Kudus. Tidak hanya itu, iklan ajakan untuk berbelanja yang diiringi *discount* besar-besaran disiarkan terus oleh radio dan

koran lokal. Imaginasi "kenikmatan" berbelanja dibangun oleh "perantara budaya" Mal Kudus tersebut. Mal Kudus menjadi satu alternatif inspirasi untuk berbelanja, apalagi ornamen di bagian muka gedung yang multiwarna telah sedikit banyak menggetarkan hati dan membangkitkan selera konsumerisme masyarakat, tidak terkecuali kaum santri, untuk memasuki ruang atau "arcade" budaya konsumsi itu. Mal Kudus di tengah masyarakat Kudus yang masih tradisional menjadi kasus unik dari sebuah proses dari apa yang dinamakan oleh Michel Jenks sebagai pencitra-rasaan seni pop obyek-obyek budaya konsumsi massa yang dihidupkan kembali ke dalam *landscape* perkotaan dan industri budaya.³

Ruang kewilayahan kota Kudus yang diajukan dalam penelitian ini tidak sekadar dilihat dalam makna geografi-struktural, melainkan juga dari kecenderungannya kepada geografi-kultural yang melahirkan berbagai fenomena kebudayaan kaum santri. Dasar pemikiran ini berasal dari David W Harvey, seorang ilmuwan ekologi-antropologi. Ia berpendapat bahwa proses produksi budaya terbawa kepada kesadaran ekonomi, politik, dan geografi.⁴ Tiga kesadaran ini ada karena: (i) munculnya modus akumulasi kapital yang lebih fleksibel; dan (ii) putaran baru dari kompresi ruang dan waktu dalam organisasi kapital. Harvey (1982) berargumen bahwa penataan ruang geografis dalam siklus kesejarahan, secara simbolik telah memberikan kerangka bagi pengalaman yang memungkinkan manusia belajar tentang siapa dan apa dirinya dalam masyarakat di mana ia berada. Karena itulah, dalam ekonomi kapitalis, pengorganisasian ruang kewilayahan adalah bagian dari kunci kekuasaan.

Proses dinamika sosial budaya di atas, tentunya tidak dapat diberi makna objektif yang terbebas dari proses-proses material. Konsepsi "pembangunan" kewilayahan senantiasa dikonstruksikan berdasarkan proses dan praktik material, yang akhirnya mereproduksi kehidupan sosial. Bagi kelompok pengusaha misalnya, pertimbangan utama pembangunan wilayah adalah tujuanmoneter.⁵ Pengejaran keuntungan telah mengubah cara kebudayaan, dan berdampak terhadap kebudayaan masyarakat yang berada di kawasan yang dibangun itu. Pergeseran dari pola tradisional, seperti kebudayaan pertanian ke pola industri, dari budaya produksi ke budaya konsumsi, dari kultur santri menjadi kultur abangan misalnya, bagi Harvey, tidak lain adalah pergeseran dalam persepsi dan pengalaman kewilayahan.⁶

Dari latar belakang di atas, ada dua masalah besar yang hendak ditelusuri oleh tulisan ini. *Pertama*, bagaimana sebenarnya pengelolaan ruang kota Kudus yang memiliki karakter tradisional sebagai kota

santri itu? Pertanyaan ini berkait erat dengan kehadiran Mal Kudus yang berada di pusat kota, terlebih mengambil tanah alun-alun yang merupakan salah satu titik kosmologis masyarakat Kudus; *Kedua*, bagaimana posisi Mal Kudus dalam proses pembentukan budaya konsumsi kaum santri? Aspek ini merupakan dampak lanjutan yang bersifat non-fisik dari model pengelolaan ruang kota.

Dengan demikian, penelitian yang menghubungkan antara pengelolaan ruang kota dengan pembentukan budaya konsumsi pada kaum santri ini dilakukan untuk dua tujuan. *Pertama*, mendeskripsikan tarik menarik kepentingan dalam pengelolaan ruang kota beserta perumusan simbolisme kotanya; dan *kedua*, mengetahui dan menjelaskan proses pembentukan budaya konsumsi pada kelompok santri yang kerap dianggap tradisional itu, termasuk usaha mengurai tarik menarik antara nilai-nilai tradisional dengan nilai modernitas. Kronologi pemikirannya dapat mengungkap aspek-aspek pengelolaan ruang kota apa saja yang dapat membentuk budaya konsumsi yang dilakukan kaum santri Kudus secara ekspresif.

B. Kerangka Pemikiran

Wertheim pernah mengilustrasikan kota sebagai sebuah teater kehidupan nyata di mana selain ada bangunan sebagai latar panggung, juga ada masyarakat, pemerintah beserta para pengusaha sebagai pemain atau pembawa peran.⁷ Dalam alur cerita kehidupan kota, pemerintah kota kadangkala berperan ganda; sebagai pemain dan pengarah cerita. Dalam posisinya sebagai sutradara, pemerintah cenderung mengatur kota sesuai kepentingan kelompoknya, sehingga seringkali menyakiti masyarakat dari berbagai kelompok sosial dan ekonomi. Dinamika sebuah kota dapat dilihat dari bentuk pertarungan antara pemerintah dengan masyarakat untuk menata kota sesuai kepentingan masing-masing.⁸ Dalam pertarungan itu, masyarakat cenderung kalah, sehingga kota seringkali ditata dengan menggusur mereka. Oleh karena itu, seringkali kota terlihat ramai dengan proyek-proyek pemerintah dan pengusaha, seperti pusat-pusat perbelanjaan dan gedung pemerintahan, yang mengambil ruang publik tanpa memperhitungkan akar budaya masyarakat setempat. Misalnya, pembangunan mal di alun-alun kota Kudus yang menghilangkan ruang sosial masyarakat dalam berinteraksi. Contoh lain adalah pembangunan area parkir di samping makam Syekh Maulana Malik Ibrahim di Kota Gresik yang menghilangkan suasana religius di sana, sehingga makam tersebut tidak lagi dilihat sebagai obyek budaya.

Secara historis, kota mempunyai makna simbolik bagi warganya. Seperti dinyatakan Peter J.M. Nas, kota merupakan ruang interaksi

masyarakat yang memungkinkan pengalaman warga kota dapat direfleksikan ke dalam wajah kota.⁹ Seperti yang terlihat dari contoh di atas, pembangunan kota sekarang tidak lagi merefleksikan “wajah sosial budaya” masyarakat. Dampak dari kenyataan ini adalah ketidakcocokan tujuan pembangunan dengan konteks kebudayaan masyarakat yang ada sebelumnya. Secara sadar, masyarakat kemudian dipaksa untuk mengubah pola kebudayaannya.

Pergeseran, perubahan, dan pergolakan dalam kebudayaan di ruang kota Kudus misalnya, akan semakin menarik dan penting dilakukan, karena tiga pertimbangan. *Pertama*, sebagian besar makna kebudayaan berasal dari simbol-simbol yang ada, dan simbol kebudayaan sendiri menuntut penggunaan ruang fisik; *kedua*, simbol-simbol kebudayaan itu kemudian berpengaruh terhadap penggunaan ruang lain, dan sebaliknya dipengaruhi oleh penggunaan ruang lain; dan *ketiga*, simbol-simbol kebudayaan kota sebenarnya merefleksikan perubahan dalam struktur kekuasaan.¹⁰ Simbol adalah bagian dari praktik kebudayaan masyarakat. Saat simbol kebudayaan dalam kota berubah, sesungguhnya ada semacam permasalahan “wacana dan praktik kebudayaan” yang sedang menimpa masyarakat, entah pola pergeseran dari budaya awal, atau pola akomodatif terhadap kebudayaan lain, semisal budaya konsumsi.¹¹

Berkenaan dengan pengaruh ruang terhadap simbol kebudayaan, Roland Barthes (1988) mengambil Tokyo sebagai studi kasus. Baginya, Tokyo bukan sekadar kota yang diisi oleh arsitektur bangunan dengan penataan jalan yang bersifat konsentris. Tokyo telah merangkai serangkaian gerakan metafisis yang dipenuhi oleh simbol spiritualitas (diwakili tanda kebudayaan gereja), kekuasaan (diwakili tanda kantor), uang (tanda bank), cita rasa (tanda mal), dan bahasa (dirangkai dalam tindakan berkafe dan berhormat). Pemaknaan semacam ini sangat tercermin pada buku *Empire of Signs* (1989), di mana Barthes memaparkan secara detail tanda kebudayaan beserta hubungan antara tandanya dalam lingkup ruang kota yang diproduksi.¹²

Tanda-tanda di atas kemudian menyusun suatu rangkaian simbolisme kebudayaan dalam struktur ruang kota.¹³ Arena pertarungannya dapat terlihat dari pola-pola perilaku atau sistem kegiatan yang dilakukan individu dan kelembagaan pada ruang-ruang tanda tersebut. Sistem kegiatan itu sendiri menurut Raonels dalam R.D. McKenzie dibagi menjadi tiga. *Pertama*, sistem kegiatan rutin berupa aspek kegiatan utama individu yang dilaksanakan, seperti pergi belanja, beribadah ke masjid, dan ke kantor. *Kedua*, sistem kegiatan terlembaga (swasta atau negeri) yang difokuskan pada hasil. *Ketiga*, sistem kegiatan yang menyangkut organisasi dari prosesnya sendiri, tidak sekadar hasil

saja melainkan sudah menyangkut hubungan kompleks dengan berbagai sistem kegiatan lain, baik dengan perorangan, kelompok maupun lembaga.¹⁴ Di sini akan tercipta pertalian yang sangat banyak dalam satu sistem saja, termasuk saat membuat jejaring tanda. Pertautan pada sistem dapat diartikan sebagai bentuk hubungan antara berbagai pihak (lembaga, individu, kelompok) yang tercermin pada proses imbal yang berulang dan terus-menerus serta di dalamnya terdapat pergerakan penduduk saja, jasa saja, barang saja, informasi atau bahkan gabungan dari elemen-elemen tersebut. Simbol kebudayaan itu akan menjadi alat komunikasi dari kelompok-kelompok tertentu dalam menjalankan sistem kegiatannya, termasuk juga dalam melegitimasi kepemimpinan, identitas sosial, dan alat kontrol kekuasaan. Karenanya, pada saat suatu ideologi, hubungan kekuasaan, dan tatanan kelembagaan berubah, maka simbol kebudayaan di dalam ruang kota yang beridentitas tradisionalisme santri sekalipun pun bisa juga turut diubah, meskipun ada kalanya tidak secara langsung.

Dalam konteks kota Kudus, kekuatan ekonomi dan sosial budaya saling terjalin dalam dialektika antara proses produksi dengan proses sosial. Keterjalinan tersebut berlangsung di dalam konteks kewilayahan kota yang selalu diproduksi dan direproduksi yang oleh Mark Gottdiener disebut *the social production of urban space*.¹⁵ Dengan demikian, ada empat asumsi dalam tulisan ini, yaitu: *Pertama*, relasi spasial maupun relasi temporal (historis) yang merupakan aspek intrinsik dalam komunitas. Hubungan antara satu ruang kewilayahan dengan kewilayahan lain dari masa ke masa merupakan bagian integral dari komunitas. *Kedua*, fenomena geografis dan demografis merupakan cerminan dari proses tarik menarik relasi sosial. Terbentuknya daerah permukiman padat yang kumuh, pusat industri atau pusat pertokoan, misalnya, tidak terlepas dari adanya perubahan relasi sosial, intervensi modal, dan kekuasaan negara di dalam dan di luar wilayah kota. *Ketiga*, meski dapat dianggap ada hubungan antara bentuk dan status wilayah dengan modal-modal produksi dalam sistem ekonomi-politik kapitalistik yang mewarnai suatu wilayah, namun hubungan tersebut tidaklah otomatis maupun statis. *Terakhir*, proses produksi ruang kewilayahan tidak sekadar proses perubahan struktur ruang, tetapi juga melibatkan peranan aktor-aktor yang memiliki pilihan untuk mengikuti struktur yang berubah itu atau bahkan ikut mengubah struktur. Artinya, dinamika dan identitas sosial budaya dari komunitas wilayah yang sebelumnya dianggap tradisional santri misalnya, kemudian akan sangat berperan besar dalam menentukan dinamika umum kewilayahannya.

C. Metode Penelitian

Permasalahan kompleks yang diangkat dalam tulisan ini dilihat secara kualitatif eksplanasi. Metode ini dikhususkan selain untuk mendapatkan data awal, juga mencari beberapa hubungan yang khas dari berbagai fenomena yang terjadi di kota Kudus. Sudut pandang ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, dan kajian budaya digunakan untuk melihat fenomena tata ruang kota, relasi sosial masyarakat, serta pembentukan dan pembakuan budaya dari unsur-unsur tanda yang ada di dalam struktur ruang kota beserta pelaku budayanya. Sudut sosiologi digunakan untuk melihat pengelolaan ruang kota oleh pemerintah. Kajian sejarah digunakan untuk melihat secara kronologis pengelolaan ruang kota beserta komunitasnya, dan kajian budaya difokuskan pada aspek pengaruh ruang kota terhadap pembentukan dan pembakuan budaya konsumsi kaum santri yang awalnya berada pada sifat tradisionalismenya. Data mengenai aspek dan unsur tata ruang kota, serta tanda dan simbol kebudayaan dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara. Di samping itu, penelusuran dokumen kesejarahan menjadi bagian tidak terpisahkan dari penelitiannya.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Ruang Kota dalam Pembentukan Budaya

Catatan sejarah tidak mungkin melupakan Kudus, sebuah kabupaten di Jawa Tengah dengan sembilan kecamatan. Selain disebut "kota wali dan kota santri", dikenal juga sebagai "tanah air" industri rokok. Kudus melahirkan sejumlah pengusaha rokok terkenal. Sebut saja Nitisemito, pemilik pabrik rokok cap *Bal Tiga*, Kuo Djee Siong (*Nojorono*), dan Oei Wie Gwan (*Djarum*).¹⁶ Kabupaten yang menjadi salah satu penghubung Surabaya dengan Semarang-Jakarta di jalur pantai Utara ini mempunyai tingkat kesejahteraan penduduk paling tinggi di Jawa Tengah. Pada tahun 2006, tingkat pendapatan per kapita mencapai Rp 6,8 juta/orang. Pada tahun yang sama, 62,26% nilai total kegiatan ekonomi mencapai Rp 7,3 triliun. Jumlah ini disumbang oleh sektor industri yang masih didominasi industri rokok. Kudus adalah cermin kota yang memungkinkan sektor industri dapat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. Sejak industri rokok lahir di Kudus tahun 1890, selain Kediri dan Malang di Jawa Timur, Kudus menjadi barometer perkembangan industri rokok di Indonesia.¹⁷ Penerimaan cukai rokok tahun anggaran 2004-2006 misalnya, mencapai angka 1,7 triliun rupiah, atau sebesar Rp 6 milyar per setiap hari. Sayangnya, angka cukai ini tidak memiliki kontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lebih ironis,

realisasi PAD pada tahun 2006 sendiri tidak mencapai Rp 12 milyar atau sebanding dengan besarnya cukai rokok selama dua hari.¹⁸

Perekonomian Kabupaten Kudus yang kini berpenduduk 704.137 jiwa, tidak sekadar ditunjang oleh industri rokok yang masih menjadi primadona. Berbagai industri lain turut menyumbang peningkatan kesejahteraan penduduknya, seperti industri bordir yang mampu memproduksi 3.000 potong per hari. Ada juga industri elektronik, percetakan, dan pengelolaan kapuk. Walaupun Kudus sepenuhnya berada di wilayah agraris yang potensial, namun sektor pertanian tidak begitu banyak menyumbang pendapatan. Sektor ini hanya menyumbang 3,55% total kegiatan ekonomi di tahun 2006. Dalam arti ini, masyarakat Kudus sepertinya tidak menyukai pekerjaan tani atau menjadikan sektor pertanian sebagai selingan saja dari kegiatan utamanya. Mereka lebih tertarik pada usaha produksi yang bersifat spekulatif. Sebagian lain lebih senang memasuki pabrik industri, walaupun sekadar menjadi buruh. Karakter usahawan dan kelompok produktif tampak dari pilihan ini.

Keterlibatan para pelaku ekonomi di atas telah ikut meramalkan dinamika kota Kudus. Mereka menjadi aktor ibarat dalam cerita novel. Seperti yang dinyatakan Wertheim di atas, bahwa sebuah kota bisa diibaratkan sebagai suatu novel tebal yang terbagi ke dalam anak bagian dan bab yang bergerak menuju beberapa puncak cerita berdasarkan gerak spiral lapis jamannya. Tidak hanya itu, kota juga adalah teater kehidupan nyata, di mana selain bangunan sebagai latar panggung, peran para politisi yang mengatur kota juga sering korup dan menyakitkan para pemain lain. Dinamika sebuah kota terletak pada ukuran sejauhmana ilustrasi teater tadi didialogkan oleh sekelompok aktor dengan kelompok aktor lain. Tidak dinafikan pula bahwa kebanyakan kota merupakan suatu teater yang sepi.¹⁹

Teater yang sepi di atas kerap diasumsikan menimpa kota-kota tua di Indonesia. Asumsi ini terkait erat dengan proses dan perkembangan kota-kota tua di Jawa khususnya. Betapapun berbeda karakteristik dan situasi kotanya, namun tetap ditandai oleh satu hal sama, yaitu kota-kota ini biasanya terletak berdekatan dengan pusat-pusat pemerintahan para bangsawan kerajaan yang menawarkan rasa aman bagi penduduknya. Tidak kecuali bagi kelompok-kelompok elite keagamaan dan koloni-koloni asing yang berada di wilayah pantai, mereka tetap membutuhkan rasa aman dari otoritas kerajaan.²⁰ Meskipun tidak sepenuhnya benar dalam soal teater yang sepi dari sebuah kota tua, apa yang dinyatakan Wertheim menimpa kota Kudus. Lintasan sejarah telah menyebutkan bahwa kerajaan Pajang, Demak, Mataram, beserta peran dan kekuasaan para wali dan ulama,

asisten residen dan wedana Belanda pernah ikut mewarnai kesejarahan sosial politik kota tua Kudus.

Sampai jaman modern pun, sebuah kota, seperti Kudus tetap diatur melalui kewenangan eksklusif pihak penguasa, seperti Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTR) dan Rencana Khusus Tata Ruang Kota (RKTRK) yang dikeluarkan pemerintah dan DPRD. Model seperti ini merupakan pengembangan lanjutan dari sistem pengaturan kota dan penduduk di zaman sebelumnya, seperti konsep *nagarakertagama* dan *mananegara* wilayah kerajaan. Model ini secara langsung berdampak terhadap pola hubungan sosial, perilaku kebudayaan, dan produktivitas ekonomis penduduk di dalam dan luar kota. Artinya, dalam mengatur kehidupan kota, terdapat situasi yang didominasi oleh kemauan feodal tradisional, bukan secara spontan kemauan komunal penduduk, lebih khusus para pedagang dan pekerja. Semuanya masih tergantung pada kemauan penguasa, baik itu mengenai tata letak maupun desain kota, termasuk semua rencana kota yang ditetapkan kewenangan yang lebih tinggi.

Fenomena relasi sosial dan identitas kota yang ada di Kudus perlu pula dirunut dengan bingkai kemauan dan kemampuan kota dalam memancarkan potensi *sentrifugal* (pergerakan penduduk dan fungsi kota dari dalam ke luar kota), serta potensi *sentripetal* (pergerakan penduduk dan fungsi kota dari luar ke dalam kota). Kedua potensi ini akan melahirkan kekuatan simbol kota yang berdampak pada keragaman pemaknaan atas tanda-tanda ruang yang terdapat dan terjadi seiring dengan perkembangan kota.²¹ Pemaknaan ini yang mempengaruhi polabudaya yang dikembangkan para penduduknya. Karena itu, ibarat novel yang menceritakan sesuatu, setiap unsur simbolisme kota perlu dikaitkan dalam kebulatan makrokosmos dan mikrokosmos struktur ruang kotanya. Simbolisme ini menyiratkan perwujudan dalam lekatan makna-makna tertentu, sekaligus berhubungan dengan pengalaman keseharian yang berada di luar perwujudan itu sendiri.

Sekalipun ada fenomena lucu yang menarik dan mungkin jarang ditemukan selain di Kota Kudus seperti hasil amatan di bawah ini:

Malam itu antara Magrib dan Isya, ada sekelompok santri berjumlah enam orang. Semua bersarung; dua di antaranya berkaca mata hitam, tiga berpeci haji, dan dua berpeci hitam, satunya menyimpan peci hitam itu di punggung belakang. Empat di antaranya masih menggenggam kitab tipis bersampul hijau kebiru-biruan dan berkertas kuning, ada yang satu buah, ada pula yang dua buah. Bila boleh diterka, kitab itu mirip dengan kitab Fathul Mu'in, atau yang satunya kitab Târikhul

Wadih. Mereka berkeliling-keliling, menggoda gadis pembeli atau para wanita berseragam biru-biru itu. Sesampainya di lift (ujar mereka), dua orang duduk di pijakan, tiga lainnya sambil petetang penteteng, menaik-turun kacamata hitam di atas kepala, yang satunya lagi membuka-buka kitab, seolah-olah membaca serius. Mungkin dalam benaknya “kok tentang mal tidak ada dalam kitab ini, wah pasti palsu nih kitab”, mereka lalu keluar menuju Masjid Jami.

Pengejaran saya terhenti sesaat, ketika sekilas terlihat juga rombongan santri perempuan berjilbab tanpa kacamata hitam atau peci haji dan peci hitam, dengan kondisi penampilan yang sama dengan kelompok santri putra ini.

Kembali saya perhatikan terus kelompok laki-laki dalam perjalanan menuju Masjid yang harus melewati alun-alun. Mereka bercengkerama. Ya sekitar 10-15 menit kemudian terdengarlah suara azan shalat Isya. Mereka langsung bergegas menuju masjid dan ritual pun dilakukan secara tepat waktu, sambil berwird cukup lama, lebih lama dari wrid saya dan diakhiri dengan shalat sunnah rawatib. Setelahnya mereka keluar dan menuju Jl. Masjid. Kemungkinan besar ke arah pesantren Qudsiyah atau TBS, bilapun tidak, mungkin mengaji ke kiai di kompleks yang biasa dikenal sebagai wilayah santri.²²

Fenomena di atas perlu dikaitkan dengan pergeseran, perubahan, pergolakan, dan transformasi pemaknaan terhadap simbol-simbol kota yang terjadi di dalamnya. Perilaku santri bersarung dan berkopiiah yang terkadang masih membawa kitab kuning dan berjalan santai, berkacamata hitam di malam hari, mencoba eskalator, mendengar musik bersuara keras sambil mengangguk-anggukkan kepala dan menggerakkan tangan ke kanan atau ke kiri, melihat baju dan celana di etalase dan gantungan meskipun tidak pernah membeli, serta diselengi cekikikan menggoda pelayan atau pengunjung Mal Kudus menjadi serangkaian tanda-tanda budaya yang melekat pada kaum santri di kota yang berubah ini. Hebatnya, kekuatan ruh kota tua sebagai kota wali dan kota santri telah memberikan “pembatasan” bagi pihak manajemen mal untuk tidak mengusir kaum santri yang berpola aneh tersebut.

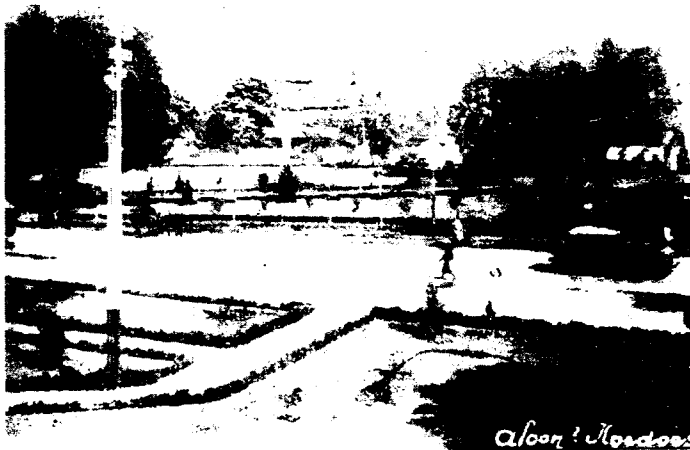
Bagaimana bila peristiwa di atas kemudian menjadi peristiwa umum yang sering dijumpai di Kota Kudus ini? Terlebih setelah pembangunan Mal Kudus bertingkat empat yang berada di lokasi alun-alun dan berhadapan langsung dengan Masjid Jami Kabupaten Kudus. Peristiwa itu dapat menjadi persoalan pada saat pemaknaan

simbol. Demikian pula bila terdengar suara shalawat, *barzanj* atau bacaan al-Qur'an ketika berada di dalam bangunan mal, dan sebaliknya ketika di masjid pun terdengar jelas suara lagu pop, rock, dan dangdut bernada keras yang berasal dari sistem audio bangunan mal, maka simbol-simbol kebudayaan semacam apa yang hendak dimaknai terhadap unsur-unsur tanda itu?

2. Membangun Simbol Kota

Dari sisi kesejarahan, Kudus dapat dikatakan sebagai kota tua. Kota yang didirikan sejak jaman kerajaan Majapahit, dan kota ini semakin tenar ketika walisongo menjadikannya sebagai salah satu pusat islamisasi. Bangunan-bangunan untuk keperluan itu dibuat dengan mempertimbangkan tradisi sosial sebelumnya. Masjid dan bangunan *nyantrik* (pesantren) dibangun dengan tidak meninggalkan arsitektur Hindu yang saat itu masih kuat, salahsatunya Masjid Menara Kudus. Tidak hanya itu, pengaruh Hindu tidak serta merta ditinggalkan. Para wali membingkainya dengan ajaran-ajaran Islam. Keyakinan bahwa alun-alun, beringin, dan pure yang posisinya kemudian digantikan oleh masjid Menara, sebagai garis linear spiritualitas dan kosmologis yang dapat menjaga sistem keseimbangan masyarakat pun masih diajarkan dan dilanjutkan oleh para wali. Berkat jasa para wali itulah, Kudus kemudian memiliki pamor sebagai "kota wali" atau identik dengan "kota yang beragama" dan "kota santri."

Alun-alun, sekarang tepatnya disebut alun-alun Simpang Tujuh Kudus, sebagai media keseimbangan ruang ukhrowi dan duniawi, masih tetap diyakini oleh masyarakat, meskipun kenyataan dalam arti "ruang fisik" dari alun-alunnya sendiri telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Masyarakat Kudus sendiri menganggapnya sebagai *ujunge aji* (ujungnya kesaktian) atau disiratkan sebagai inti kekuatan. Dua buah pohon beringin dan dua bangunan peristirahatan yang berada di sampingnya dahulu diberi makna simbol spiritual. Dua pohon beringin menjadi tanda dari akses spiritualitas kekuatan ruh atau jiwa penunggu "wali kutub". Adapun dua bangunan, meliputi bangunan *pamongpraja* (bidang administrasi pemerintahan) khusus untuk orang kecil (*tiang alit*) dan bangunan kedua satu pos patroli *pangrehpraja* (bidang keamanan, seperti polisi) memberi simbol makna bagi pemenuhan akomodasi kekuatan sipil dan militer. Dahulu, alun-alun dengan sendirinya telah menyimbolkan aspek kebudayaan, rasa keagamaan, kekuatan ekonomi, dan politik kekuasaan masyarakat Kudus. Perhatikan foto tahun 1935 di bawah ini:



Alun-alun Kudus tahun 1930-1935

Nilai spiritualitas alun-alun semakin diperkuat dengan kehadiran Masjid Jami yang memiliki karakter tradisional. Sebelumnya, masjid ini terbuat dari *tatal* (potongan kayu) dengan mengambil model arsitektur *limasan*, persis masjid Demak. Masjid ini menjadi pusat kekuatan dari simbol kota santri. Bangunan fisik yang dapat menandakan Kudus sebagai kota santri sepertinya bertahan sampai tahun 1962. Setelah itu, ruh tersebut semakin pudar, khususnya ketika terminal (*stanplat*) dokar berganti menjadi *stanplat* kendaraan bermesin, dan munculnya pasar baru dan gedung bioskop Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) di sebelah tenggara. Kehadiran Bioskop yang menggunakan sistem layar tancap disinyalir sebagai bagian dari politik kebudayaan nasional, agama, dan komunis (Nasakom) yang diusung oleh kelompok “Merah Semarang”. Pendirian bioskop yang seolah dipaksakan ke masyarakat Kudus ini memiliki tujuan agar kentalnya keagamaan Islam dari organisasi Syarikat Islam dapat dicairkan, sehingga ide sekuler dan nasionalisme dapat diterima masyarakat Kudus. Menurut informasi, upaya seperti ini didukung oleh komunitas Cina di *gettho* Pecinan, yang sebelumnya mereka telah menguasai industri hiburan, cetak mencetak, kertas rokok, dan *supply* tembakau.

Komunitas Cina di Kudus sendiri telah ada sejak peristiwa *chinezengmoorder* di Batavia tahun 1740 dan peristiwa pemberontakan di Cirebon tahun 1818. Berdasarkan ikatan etnis, orang Cina yang berasal dari dua daerah itu kemudian bermigrasi menuju Lasem dan Jepara. Di kedua daerah tujuan tersebut telah terdapat komunitas Cina migran Tiongkok yang datang jauh sebelum peristiwa Batavia dan Cirebon. Mereka kemudian menempati kampung (*gettho*) Pecinan yang berada di atas tanah-tanah *adendum* Belanda, bukan tanah milik. Hal ini

dilakukan Belanda sebagai wujud kompensasi dari kesalahpahaman pada peristiwa di Batavia²³ dan berlakunya kebijakan *passenstelsel* dan *wijkenstelsel*.²⁴ Di satu sisi, dua kebijakan itu seolah membatasi ruang gerak Cina untuk beraktivitas dan bermasyarakat. Tetapi di sisi lain, kebijakan ini dapat memberikan keleluasaan kepada orang Cina untuk mengembangkan usaha dan jaringan antar *getthonya*. Secara politik ekonomi, tanah *gettho* Pecinan itu sengaja dipinjamkan oleh Belanda untuk menandingi ramainya perdagangan kaum santri kelompok Syarikat Islam dan Arab di Pasar Kliwon dan kawasan Menara Kudus.

Cara seperti ini sebenarnya adalah bagian dari politik belah bambu, tujuannya untuk mengurangi tingkat ekonomi kaum santri.²⁵ Dampak dari kebijakan ini telah memunculkan semangat anti Cina di Kudus pada tahun 1918. Kekerasan rasial tersebut dianggap sebagai tragedi "Batavia jilid kedua". Menurut pandangan Masyhuri (1981), persoalannya disinyalir bukan semata urusan rasial, tetapi berujung pada kepentingan ekonomi-politik organisasi Syarikat Islam.²⁶ Sampai tahun 1967, kebijakan pemerintah RI pun menyebabkan orang Cina tidak memiliki tanah sendiri. Karena keterbatasan inilah, mereka kemudian menggiatkan roda ekonominya dengan cara pelibatan orang pribumi. Mereka hanya bisa mengelola industri hulu di berbagai distrik, dan industri hilir diambil alih oleh masyarakat pribumi. Sistem kegiatan ekonomi seperti ini selaras dengan kebijakan pemerintah waktu itu, dengan penyebutan Program Ekonomi Ali-Baba.²⁷

Karena letak *gettho* berdekatan dengan alun-alun, maka pada masa-masa berikutnya, orang Cina sedikit demi sedikit menguasai wilayah pusat kota. Di sepanjang jalan Simpang Tujuh Kudus, toko-toko klontong orang Cina pun kemudian berjejer. Beberapa bangunan rumah dan toko orang pribumi dibeli oleh mereka. Saat itu, alun-alun menjadi wilayah alternatif kegiatan ekonomi dari wilayah Menara Kudus. Terlebih, alun-alun memiliki daya dukung yang lebih memadai, yaitu taman kota. Sejak tahun 1937, taman kota dikelola oleh dinas perkotaan (*assenering*) yang melibatkan para opas dan pekerja wajib, karena alun-alun merupakan wilayah pusat pemerintahan. Saat itu, aktivitas lalu lintas lebih banyak dilalui oleh dokar dan sepeda ontel, pejalan kaki pun boleh melintas di tengah jalan. Di tahun 1932-1946 hanya terdapat dua mobil pribadi, yaitu milik Nitisemito dan Bupati Kudus, empat truk dari maskapai tembakau Sukun, Nojorono, dan perkebunan kapuk di Kudus.

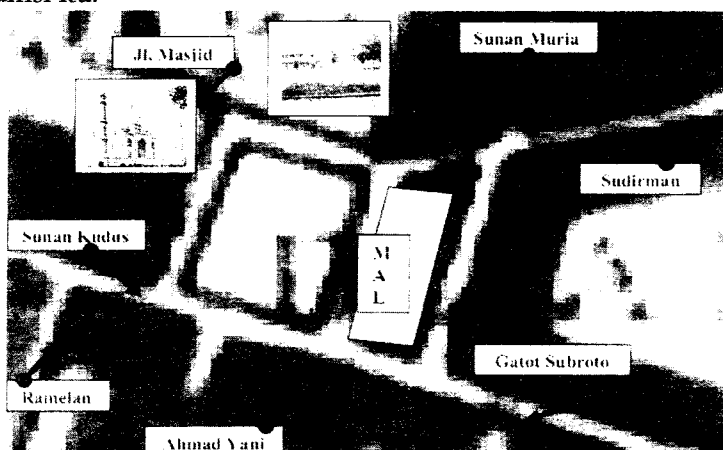
Sebagai daya dukung wilayah pusat pemerintahan, masjid kecil yang ada sebelumnya kemudian dikembangkan menjadi Masjid Jami. Masjid ini berada di seberang jalan dari permukiman Cina (*Pecinan*). Di

sebelah kanan masjid terdapat pusat administrasi pemerintahan (*pamongpraja*) distrik. Di tempat inilah kegiatan teknis pemerintahan kolonial diselenggarakan. Di sebelah timur, terdapat kegiatan jual beli seperti pasar kaget, lebih dikenal sebagai Pasar Gantung. Pasar ini dikhususkan bagi transaksi barang atau sekadar transfer *barter* dari pasar induk. Dalam perkembangannya, pasar induk ini tetap berada di lokasi Pasar Kliwon di kompleks industri Nojorono Kudus. Seperti disebutkan sebelumnya, setelah tahun 1962 ruh kota tradisional yang dicerminkan oleh alun-alun Kudus semakin meredup. Alun-alun Simpang Tujuh dipadati oleh lalu lintas kendaraan bermotor. Sebagian besar lokasi *stanplatz* pun kemudian dijadikan rumah toko. Kondisi ini terus berlangsung, bahkan semakin memburuk sampai tahun 2006. Pembangunan liar di atas tanah alun-alun sebenarnya tidak sesuai dengan *masterplan* kota Kudus tahun 1978-1998 sendiri yang masih mengikuti pola *de Stads Vormings Ordonantie/SVO* (S. 1948.168) dan *de Stads Vormings Verordening/SVV* (S. 1949. 40).²⁸

Pada tahun 1992, Pemerintah Kudus sebenarnya menyadari kondisi ini. Mereka kemudian membangun dan mengembangkan Pasar Kliwon yang berada di sekitaran Menara sampai bertingkat tiga. Tujuannya untuk menyerap para pedagang alun-alun. Upaya ini gagal, karena aktivitas perdagangan di alun-alun bagi sebagian orang lebih menguntungkan, ketimbang berada di Pasar Kliwon yang harus bersaing dengan para pedagang mapan yang ada sebelumnya dan telah berbentuk jejaring ekonomi.²⁹ Akhirnya, kepentingan pengembangan alun-alun sebagai pusat ekonomi yang bersifat konsumtif lebih dikedepankan pemerintah dan pengusaha, walaupun harus mengorbankan tanah yang memiliki nilai spiritualitas sakral. Pada tahun 1992, terminal (*stanplatz*) sedikit demi sedikit diubah menjadi pertokoan. Pemerintah Daerah mengusahakan agar toko-toko itu diubah menjadi Toserba (Toko Serba Ada). Alasannya untuk mengatasi kekumuhan. Niat itu tidak sekadar terhenti di situ. Ide mengenai Toserba sebenarnya menjadi pijakan pertama pengembang untuk melempangkan niatnya membangun Mal Kudus. Pembangunan Toserba sendiri berlangsung dua tahun, dan hasil bangunannya tidak menarik. Pembangunan yang dilakukan pengembang tersendat dengan alasan krisis moneter.³⁰ Pada tahun 1996 terjadi kesepakatan tingkat elite, tanpa prosedur administrasi pemerintahan, untuk memperluas dan meninggikan Toserba menjadi empat lantai. Salah satu caranya adalah menggusur para pedagang makanan, *stanplatz*, dan toko-toko yang berada di sampingnya.³¹ Pengembang Mal Kudus akhirnya dapat menguasai lahan seluas dan selebar alun-alun dengan ukuran bangunan 80 m x 24 m.

3. Konsumerisme versus Produktivitas Tradisional Kaum Santri

Mal Kudus hadir tepat di jantung *power of centrum* kota. Alun-alun sendiri selebar 85 m x 67 m atau seluas 5695 m yang dibatasi oleh jalan lingkaran Simpang Tujuh. Pada awalnya alun-alun menjadi area hijau dan taman kota yang menarik untuk dipandang, sekaligus juga berfungsi sebagai daya dukung pernapasan kota. Dalam benak masyarakat, alun-alun telah mampu memberikan kesegaran saat mereka melakukan *riblah* (putar-putar) ke Tugu Identitas Kudus, pusat perbelanjaan, industri, dan perbankan di Jl. Ahmad Yani, Jl. Sudirman, Jl. Gatot Subroto, Jl. Ramelan, Jl. Sunan Kudus, dan Jl. Sunan Muria. Sebelum didirikannya Mal Kudus, peziarah walisongo yang melintasi Simpang Tujuh dapat menikmati dan merasakan ruh sebuah kota wali dan kota santri. Tapi apa boleh buat, ruh sebagai kota tradisionalisme santri itu pun hilang digantikan oleh hingar bingarnya “*arcade*” budaya konsumsi itu.



Peta *System of Position* Lokasi Kegiatan

Mal Kudus dengan mudah didirikan di pusat kota, tepatnya di alun-alun Simpang Tujuh, sebagai hasil kompromi dan kebijakan ekonomi-politik para elite penguasa dan pengusaha.³² Secara birokratis, pendirian itu didasari semangat untuk tidak menggantungkan sepenuhnya kepada industri rokok, di mana cukainya lebih banyak terserap oleh Pemerintah Pusat. Mal ini awalnya diharapkan mampu menyerap industri bordir, sehingga dapat mensubsidi pendapatan lokal daerah. Argumentasi ini kemudian menjadi mentah ketika terjadi perbenturan fungsi dari ruang-ruang kota lainnya. Ditinjau dari segi lokasi, letak Mal Kudus tidak berjauhan dengan Pasar Kliwon. Akibatnya, pengecer kecil sampai pengecer sedang kalah bersaing dengan kekuatan pemilik modal besar yang menguasai Mal Kudus ini. Dampak yang tidak kalah penting adalah tergusurnya ruang-ruang

yang memiliki simbol-simbol kebudayaan dan keagamaan yang telah melekat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari identitas Kudus sebagai “kota wali” dan “kota santri” yang ada jauh sebelumnya.

Meskipun kehadiran jaringan mal bermanajemen terpusat ini, seolah menjadi tanda dari sebuah alat pengubah arah masyarakat, namun ia merupakan sebuah titik mula dari keterbalikan kondisi Kudus pada awal pencitraan dirinya. Ruang kota Kudus secara tradisional telah berusaha mencitrakan arah kosmopolitan yang menghubungkan ruang profan dan ruang sakral. Alun-alun menjadi *power of centrum*, sebuah ruang yang memberikan kesempatan bagi keseimbangan aspek-aspek ukhrawi dan duniawi. Ruang terpusat ini merupakan ruang yang perlu disakralkan dan hanya digunakan untuk kegiatan sakral publik. Ruang keseimbangan itu kemudian hancur demi pertimbangan ekonomi-politik yang memunculkan bangunan Mal Kudus. Secara morfologis saja, Mal Kudus tidak tepat berada di wilayah Simpang Tujuh Kudus. Wilayah ini beserta variabel ruang ekor dan alun-alun sebagai pusatnya sebenarnya lebih mengarah pada sistem konsentris (terpusat). Bentuk morfologi kota semacam ini paling cocok untuk kota yang perkembangan areal kekotaannya didominasi oleh pengembangan industri. Masing-masing lidah (variabel ekor) hendak dibentuk oleh pusat kegiatan kedua yang berfungsi memberi pelayanan areal kekotaan yang letaknya agak jauh dari pusat kegiatan utama. Sementara itu bagian-bagian yang menjorok ke dalam direncanakan sebagai jalur hijau dan berfungsi sebagai paru-paru kota, tempat rekreasi, dan tempat olah raga penduduk kota. Penjagaan kelestarian daerah hijau seperti ini biasanya diatur melalui undang-undang/peraturan (*masterplan*), sehingga apabila ada pelanggaran dapat diancam oleh sanksi. Dengan demikian, kelestarian jalur hijau yang didambakan oleh penduduk kota dapat dijaga. Dalam arti ini, letak dan pembangunan Mal Kudus di alun-alun telah menyalahi pertimbangan morfologis, karena tidak berada pada *system of position* struktur ruang kota seperti yang direncanakan jauh sebelumnya.³³

Seperti pendapat Raonels mengenai sistem kegiatan di atas, jangankan dengan sebuah mal, seperti Mal Kudus, kompleks Kauman yang dihuni oleh para priyayi dan santri Kudus misalnya dapat saja salah posisi, bila ia dibangun tidak sesuai dengan pola awal pengelolaan kota. Padahal kawasan terakhir ini menjadi suatu daerah yang resmi dan jelas-jelas muncul jauh sebelumnya dari sistem-sistem kegiatan administrasi pemerintahan dan keagamaan. Kedua sistem posisi ini sendiri saling bertautan dengan kegiatan dan elemen ekonomi, politik, dan budaya dalam perwujudan-perwujudanyang

legal. Karena itu, hak mengolah sumber-sumber ekonomi, termasuk di dalamnya menjual “ruh atau nilai-nilai kesakralan” kuburan para wali di Menara Kudus misalnya hanya akan berada pada orang-orang yang berada pada “sistem Kauman”, baik dalam peran mereka sebagai juru kunci, penjaga Menara, pedagang pernak-pernik maupun para pemungut sadaqah dari kelompok peziarah. Tempat “*ekonomi kuburan*” barangkali itu sebutan yang cocok, dalam perkembangan sejarahnya memang mewujud pada daerah tempat tinggal mereka. Di dalamnya terdapat kompleks Menara Kudus, serta kuburan para wali dan “kuburan siapa pun yang dimitoskan.” Wajar bila daerah ini kemudian berkembang menjadi kawasan kegiatan *ekonomi kuburan*, sekaligus permukiman para *pini sepuh* yang berdarah biru dan kaum santri.

Posisi dan sistem nilai yang dimiliki kaum santri di kompleks Menara Kudus beserta aktivitas “*ekonomi kuburan*”nya sedikit demi sedikit mulai terganggu dengan kehadiran Mal Kudus. Dalam arti ini, keberadaan Mal Kudus sedikit banyak telah menyumbang terjadinya pergeseran, atau jika boleh dikatakan “perubahan” budaya kesantrian yang ada. Mal juga telah membawa arus global kapitalisme yang mengubah gaya hidup dan praktik budaya kaum santri, yaitu dari kebiasaan sebagai masyarakat produksi yang ditandai oleh kegiatan ekonomi di sekitar Menara Kudus dan Pasar Kliwon, menjadi kebiasaan masyarakat konsumsi. Kebiasaan ini dilakukan dengan cara mengunjungi Mal Kudus, meskipun sekadar menikmati citra rasa dengan tanpa meninggalkan identitas kesantriannya. Dalam arti ini, perilaku kaum santri ketika berada di Mal Kudus walaupun tidak membeli produksi yang terpajang, bisa dimaknai sebagai proses menikmati cita rasa: bangunan, musik, asesori, dan pegawai yang ada. Penikmatan cita rasa ini dilanjutkan dengan jalan-jalan, duduk santai di sekitar kantor bupati dan lingkungan lampu merah, serta main bola di alun-alun sebagai usaha kreatif dalam memanfaatkan ruang sekitaran, baik dalam arti “ruang biasa” maupun “ruang imajinasi”nya sebagai bagian dari relaksisasi kepenatan mengaji. Dalam arti ini, kehadiran Mal Kudus jangan-jangan tidak membawa keuntungan ekonomi kapitalisme kepada kaum santri, tetapi sekadar memberikan pengaruh cita rasa “budaya baru” terhadap mereka. Karena secara ekonomis, santri sebenarnya masih menggantungkan diri pada proses produksi di Menara Kudus dan Pasar Kliwon.

Mal Kudus, meskipun tidak terlalu besar adalah contoh baik dari proses kapitalisasi, termasuk juga perubahan struktur dan fungsi ruang kota untuk menjadi pusat konsumsi yang dibangun di atas tanah terpenting di wilayah yang secara ekonomis sebenarnya tertekan. Pengalaman perjalanan (*rihlah*) duniawi di Mal Kudus yang di

dalamnya terdapat “kekacauan budaya” dan “penggayahidupan” telah menjadi gambaran umum ruang publik, di mana konsumsi dan pemanfaatan waktu luang dibuat sebagai pengalaman mengkonsumsi.³⁴ Penampakan nyata seperti ini tentu tidak hanya terjadi pada tingkatan bentuk pengalaman umum yang dicoba untuk dimunculkan oleh sang iklan, desainer, arsitektur dan perantara budaya lain, melainkan juga ada kaitannya dengan aliansi yang dibentuk antara patron, pengawas, dan pemberi modal Mal Kudus. Jejaring pelaku seperti ini telah mampu menyusun simbol-simbol kapitalisme pada tanda ruang tertentu. Proses seperti itu hampir sama dengan proses pembentukan simbol budaya tradisional yang melekat pada ekonomi kuburan. Menara Kudus adalah tanda awal kebudayaan tradisional kaum santri yang bersifat eklektik. Di dalamnya tercakup ruang simbolisme yang dapat memunculkan mitos komunal masa lalu dengan tanda kebudayaan berupa kuburan dan kotak infak yang dimanfaatkan untuk menggerakkan sistem kegiatan ekonomi kuburan.

E. Penutup

Dinamika sebuah kota dapat dilihat dari bentuk pertarungan antara pemerintah dengan warga kota untuk menata kota sesuai kepentingan masing-masing. Secara historis, kota mempunyai makna simbolik bagi warganya. Kota juga merupakan ruang interaksi masyarakat yang memungkinkan pengalaman warga kota dapat direfleksikan ke dalam wajah kota. Fenomena di Mal Kudus adalah peristiwa awal yang membawa penelitian ini dilakukan. Keunikan dinamika sosial budaya kota sebenarnya terpusat pada ruang yang dianggap sebagai *power of centrum*. Ruang seperti ini kerap diyakini masyarakat sebagai media penyeimbang simbol kota yang dibangun dari kekuatan makrokosmos dan mikrokosmos, juga antara kekuatan *pamongpraja* dan *pangrehpraja* dengan masyarakat yang seringkali berebut dalam usahanya untuk mengelola ruang kota. Perubahan atas keberadaan dan fungsi ruang kota akan berdampak langsung terhadap sistem budaya yang ada pada masyarakat. Dengan demikian, dinamika ruang kota telah dan akan menghasilkan ekspresi simbolisme dan praktik budaya masyarakat.

Sistem kegiatan ekonomi masyarakat Kudus yang memiliki hubungan dengan praktik kebudayaan dan tuntutan atas penggunaan ruang dapat dibagi ke dua jenis, yaitu *ekonomi kuburan* yang berpusat di Menara Kudus, dan *ekonomi ngemal* yang berpusat di Mal Kudus Simpang Tujuh. Dua jenis kegiatan ini telah bersimultan dengan kekuatan politik dan budaya. Dua kegiatan ini pula lah yang telah membentuk simbol-simbol kota, meskipun satu sama lainnya saling

bersitegang. Pembentukan simbol-simbol kota ini dilakukan dengan cara mengembangkan kota secara *sentrifugal* dan *sentripetal*. Untuk memenuhi itu, keberadaan dan fungsi tanda-tanda dalam ruang kota seakan diatur berdasarkan hegemoni ekonomi, politik kekuasaan, dan kharisma. Hegemoni kekuasaan yang paling kentara sebagai alat untuk merebut ruang yang dianggap menguntungkan, “berkah”, dan ruang yang memberi kemudahan bagi akses transportasi.

Hal seperti ini terlihat pada peran para pemilik kharisma di wilayah Menara Kudus saat menggerakkan sistem kegiatan tradisional “ekonomi kuburan” kaum santri. Selain pembentukan sistem kegiatan dan sistem budaya tradisional tersebut, kolaborasi pemerintah dengan para pengusaha telah memungkinkan lahirnya sistem kegiatan ekonomi modern, yaitu pembangunan Mal Kudus di alun-alun, beserta dampak kebudayaan “*ngemal*”nya. Dalam kesejarahannya, *power of centrum* itu diserahkan oleh Belanda sebagai *gettho* Cina untuk menyaingi aktivitas dagang santri di kompleks Menara dan Pasar Kliwon. Dengan mal ini, masuk dan membakunya budaya konsumsi, walaupun sekadar penikmatan citra rasa modernitas bagi kaum santri di Kota Kudus, semakin memungkinkan terjadinya. Penikmatan citra rasa seperti itu yang barangkali paling strategis dilakukan oleh kaum santri untuk tidak menghilangkan identitas tradisionalitasnya. Mal Kudus akan dianggap oleh mereka sebagai ruang kedua, yaitu ruang untuk menghilangkan kepenatan mengaji dan ruang menikmati citra rasa budaya konsumsi. Dalam arti ini, berbicara tentang praktik kebudayaan kaum santri secara umum tidak bisa dilepaskan dari aspek politik, budaya, teknologi, ekonomi, dan ruang fisik yang mencakupi kehidupannya.

Secara singkat, penelitian ini menyimpulkan dua hal. *Pertama*, kepentingan ekonomi dan politik kekuasaan sangat terasa dalam pengelolaan ruang kota Kudus. Karena lebih menekankan pada aspek ekonomi, maka pengelolaan ruang kota Kudus telah jauh meninggalkan nilai-nilai tradisi keagamaan dan kebudayaan yang ada dan dikenal dalam kesejarahan masyarakat Kudus; *kedua*, kehadiran Mal Kudus di Simpang Tujuh Kudus telah memberi pengaruh bagi pola pergerakan dan perubahan praktik-praktik kebudayaan kaum santri, dari budaya produktif menuju budaya konsumsi. Mal tidak sekadar menjadi media dari penghilang kepenatan mengaji, tetapi telah sampai pada tahap pencitra-rasaan budaya konsumsi, termasuk dalam soal meluaskan konsumsi waktu.

¹Perantara budaya adalah unsur-unsur yang terlibat dalam permainan dan fasilitas komunikasi dalam pertukaran antar tanda dan simbol. Agen ini merangkap juga sebagai inspirator dan produksi atau perekayasa tanda budaya baru dan hasilnya dapat dinikmati dan dirasakan masyarakat. Seperti kegiatan *Indonesian Idol* yang meniru pola *American Idol* adalah rekayasa dari para produser dan *screenplay* media televisi. Lihat Pierre Bourdieu. *The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature* Pierre Bourdieu. Columbia: Columbia University Press, 1993, hlm. 27-35.

²Daniel Bell. *The Cultural Contradiction of Capitalism*. London: Heinemann Bell 1976, hlm. 9.

³Charles Jencks. *The Language of Post Modern Architecture*. New York: Rizolli, 1984, hlm. 76.

⁴Iwan Sudrajat. Diskursus Posmodernisme Seorang Geografer Marxis. *Basis* No 01-02, tahun ke-49, 2000, hlm. 63.

⁵ Seperti ditekankan Harvey, "money has no meaning independent of time and space" dalam David W Harvey. *Social Justice in the City*, London: Edward Arnold, 1973, hlm. 65.

⁶David W Harvey. *The Condition of Postmodernity*. London: Edward Arnold Harvey, 1982, hlm. 34-42.

⁷W.F. Wertheim. *Indonesian society in transition: A study of social change*. 's-Gravenhage: Van Hoeve, 1959, hlm. 34.

⁸Diakui pula bahwa fenomena struktur ruang kota yang meliputi tata letak, kuasa kelola, beserta model bangunan lebih banyak dikaji ahli geografi perkotaan dan arsitektur. Sebaliknya, analisis dalam aspek pengaruh dan pemaknaan ruang terhadap komunitasnya kerap dilakukan oleh para pemikir kajian kebudayaan.

⁹Peter J.M. Nas. *Kota di Dunia Ketiga: Pengantar Sosiologi Kota*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1993, hlm. 53.

¹⁰*Ibid.*, 62-64.

¹¹Pierre Bourdieu, *op. cit.*, hlm. 78.

¹²Roland Barthes. "The Imagination of the Sign". Dalam *Image, Music and Text*. New York: Hill and Wang, 1988, hlm. 13-19.

¹³Peter J.M. Nas, *op. cit.*, 62-70.

¹⁴McKenzie. "The Ecological Approach to the Study of Human Community." Dalam R.E. Park, E.W. Burgess, dan R.D. McKenzie (eds). *The City*. Chicago: University of Chicago Press, 1979, hlm. 98.

¹⁵ Proses ini sepenuhnya mencakup aspek ruang kewilayahan dan aspek para penghuni dalam sebuah rentang kesejarahan sosial. Ruang kewilayahan sendiri selalu berwujud dan mempunyai pengertian dimensi geografis. Dimensi geografis ini bukanlah sesuatu yang alamiah. Lihat Mark Gottdiener, *Postmodern Semiotics: Material Culture and the Forms of Postmodern Life*. Oxford: Blackwell, 1995, hlm. 119-138. Struktur kota Kudus, batas-batas, serta dinamika sosial di dalamnya terbentuk melalui sebuah proses sejarah yang panjang. Dari masa ke masa, kontestasi dan negosiasi batas-batas geografis demi berbagai kepentingan sering dilakukan dengan berbagai cara. Hal seperti ini seiring pendapat Kuntowijoyo dalam *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: UGM Press, 1994, hlm. 55-62, yang menekankan lima bidang garapan ketika melihat wilayah kota, yakni ekologi kota, transformasi sosial perkotaan juga termasuk di dalamnya soal ekonomi, sistem sosial, problema sosial, dan mobilitas sosial. Secara jitu Kuntowijoyo menunjuk aspek sosial budaya transformasi kota sebagai aspek sentral dalam proses dinamika sosial masyarakat.

Dengan melihat aspek sosial ini, pemahaman terhadap dinamika kota tidak berujung pada sesuatu yang dianggap sebagai entitas alamiah yang terjadi tanpa intervensi manusiawi, melainkan sebuah entitas sosial yang sarat dengan dinamika lembaga-lembaga sosial maupun relasi sosial.

¹⁶Perkembangan dan kejayaan industri rokok dapat dilihat di Museum Kretek di Jl. Getas Pejaten, Kudus. Lihat juga buku Tim Museum Kretek. *Sejarah Industri Rokok Kudus*. Kudus: Menara, 1987.

¹⁷Departemen Perindustrian dan Perdagangan. *Laporan Akhir Tahun 2002*. Kabupaten Kudus: Setda, 2002, hlm. 37.

¹⁸Setda Kudus. *Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Tahun 2001-2005*. Kudus: Setda Pemerintah Kabupaten Kudus, 2001, hlm. 16.

¹⁹Pratiwo, *Simbol-simbol Kota*. Jakarta: KITLV-NIOD, 2004, hlm. 1

²⁰W.F. Wertheim, *op. cit.*, hlm. 34.

²¹Hadi SabariYunus. *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 48-45.

²² Pengalaman ini didapat ketika peneliti melakukan penelitian pertama kali di Kudus pada tahun 2003-2004 tentang tema industri kapuk di zaman kolonial Belanda (*Nederlands Instituute voor Oorlogs Documentatie-NIOD* Amsterdam). Kesan pengamatan ini pula yang melatari keinginan untuk meneliti berbagai fenomena mal beserta tanda lain dalam struktur ruang kota tradisional. Beberapa data diambil dari Tesis Kajian Budaya Magister Ilmu Budaya Universitas Sanata Dharma.M. AlieHumaedi. *Dari Tradisionalisme Santri ke Kapitalisme Tanda. Tesis. Magistes Ilmu Religi dan Budaya*, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2004, dengan pembiayaan dari "Program Budaya dan Masyarakat di Indonesia" Ford Foundation.

²³ Peristiwa *chinez-enmoorder* (pembantaian Cina) ini dituliskan Jan Risconi dalam *Syair Kompeni Welanda Berperang dengan Cina*, berisi "Perang Jakarta sudah berhenti, perang menang rugi Kompeni; negeri pun sunyi, Cina lari...". Orang Cina yang lolos dari pembantaian menyelamatkan diri ke berbagai wilayah di Jawa. Sebagian lari ke Semarang untuk bergabung dengan Sunan Kuning yang juga seorang Cina yang sedang berperang melawan VOC dalam soal pergantian Paku Buwana II. Sebagian lagi ditampung Tumenggung Lasem, Widyaningrat alias Ui Ing Kiat seorang Cina Islam. Ada juga yang pergi ke Banten (*Carita Lasem*, R. Panji Kamzah, 1857 dalam Sumanto. *Arus Cina Islam Jawa: Bongkar Sejarah atas Peranan Tionghoa dalam Penyebaran Agama Islam di Nusantara abad XV dan XVI*. Yogyakarta: Inspeal, 2004, hlm.199.

²⁴*Passenstelsel*, yakni keharusan bagi setiap orang Cina untuk mempunyai surat jalan khusus, apabila hendak bepergian ke luar distrik tempat dia tinggal. Ada pula *wijkenstelsel*, peraturan ini melarang orang Cina untuk tinggal di tengah kota dan mengharuskan mereka membangun *gettho* berupa Pecinan untuk tempat tinggal mereka, agar mudah diawasi. Dua kebijakan politik ini timbul akibat peristiwa *chinez-enmoorder* di Batavia tahun 1740. Lihat Sumanto, *op. cit.*, hlm. 211.

²⁵P.J. van Gulik. *Memorie van Overgave Juni tahun 1930*. Jakarta: ANRI, Koleksi 1938, hlm. 38-39.

²⁶Masyhuri. *Konflik Sosial di Kudus 1918: Terlibatnya Syarikat Islam di Kudus dalam Konflik Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: UGM Press, 1981.

²⁷Peter J.M. Nas, *op. cit.*, hlm. 78-82.

²⁸M. Tamzil. *Visi Misi Pembangunan Kabupaten Kudus 2003 – 2008*. Kudus: Sekretaris Daerah, 2004, hlm. 30.

²⁹ Hal di atas dimengerti karena pedagang di alun-alun Simpang Tujuh kebanyakan pemain baru dalam perdagangan dan melihat potensi kedatangan peziarah Menara Kudus dan makam wali sebagai pangsa pasarnya. Secara strategi perdagangan, alun-alun merupakan pintu masuk utama berbagai jalur transportasi lintas Pantura. Potensi strategis ini dilihat sebagai usaha pengembangan perdagangan di alun-alun yang seharusnya menjadi *public sphere* dan *power of centrum* "spiritualitas dan fisik".

³⁰Wawancara 18 April 2004 dengan Pak Agus [48 th] dan Pak Denuh [52 th], mantan pedagang Toserba.

³¹ Informasi didapatkan dari wawancara beberapa pegawai pemerintah (tidak disebutkan). Hal ini diperkuat berita yang dimuat Harian Merdeka, terbitan tahun 1997-2002. Ada beberapa kejanggalan pada kasus Mal Kudus: 1) bila pengembang melakukan kontrak tanah selama kurun waktu 25 tahun dalam tabel pendapatan daerah tidak menyebutkan pemasukan item ini; 2) apakah sewa kontrak lahan ini diberikan dengan atau dalam bentuk bangunan yang telah ada; 3) pembangunan mal sejak dari Toserba tidak disetujui secara kelembagaan oleh pihak legislatif, meskipun yang meresmikannya Bupati R. Sudharsono.

³² Menilik soal peraturan keberadaan jaringan mal di Indonesia dipayungi Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag), sejumlah jaringan ritel dapat beroperasi. Namun demikian, operasi ritel besar lebih banyak tunduk pada dominasi kekuasaan daerah atau pejabat tertentu. Tak ayal terjadi persinggungan antara SK Menperindag dengan dominasi kekuasaan terselubung yang saling bertentangan, seperti kasus *hypermarket* Carrefour (media Indonesia 2002; 6). Guna mengantisipasi persoalan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan meninjau ulang SK yang telah dikeluarkan sejak tahun 1997. Setidaknya ada tiga Surat Keputusan (SK) Menteri yang mengatur pengecer, yaitu Surat Keputusan Bersama (SKB) Menperindag Nomor 145/1997 dan Mendagri Nomor 57/1997 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan, SK Menperindag Nomor 261/1997 tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pemantau Pasar dan Pertokoan Pusat, dan SK Menperindag Nomor 420/1997 mengenai Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Pertokoan. SKB dan SK ini secara ekonomi-politik khususnya jiwa ekonomi sosialisitik dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi yang berkembang. Media Indonesia. *Laporan Berita tentang Merebaknya Industri Retail di Kota-Kota Besar*. Artikel dimuat pada tanggal 2 Juni 2002, hlm. 5.

³³ Ketidakadilan pemerintah atas kelola ruang kota Kudus terbukti dengan terjadinya pelanggaran struktur kegiatan perkotaan dan sistem pertanahan yang telah ditetapkan pedoman Rencana Induk Ibukota Kabupaten Dati II Kudus tahun 1980 s.d. 1998, menyatakan pusat kota di alun-alun tetap menjadi pusat kota pengembangan sebagai pusat perkantoran dan pusat perdagangan kerakyatan. Kegiatan perdagangan besar dan industri perlu ditinjau lagi untuk dipindahkan pada kawasan industri di pinggiran kota.

³⁴Ernst Meijer(ed). *Everyday Life: Leisure and Culture*. Tilburg: University of Tilburg Press, hlm. 34.

DAFTAR PUSTAKA

- Barthes, Roland. (1981). *The Elements of Semiology*. New York: Hill and Wang.
- , (1988). "The Imagination of the Sign". Dalam *Image, Music and Text*. New York: Hill and Wang.
- Bell, Daniel. (1976). *The Cultural Contradiction of Capitalism*. London: Heinemann.
- Bourdieu, Pierre. (1993). *The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature* Pierre Bourdieu. Columbia: Columbia University Press.
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan. (2002). *Laporan Akhir Tahun 2002*. Kabupaten Kudus: Setda.
- Gottdiener, Mark. (1995). *Postmodern Semiotics: Material Culture and the Forms of Postmodern Life*. Oxford: Blackwell.
- Gulik, P.J. van. (1938). *Memorie van Overgave Juni tahun 1930*. Jakarta: ANRI.
- Harvey, David W. (1982). *The Condition of Posmodernity*. London: Edward Arnold.
- , (1973) *Social Justice in the City*, London: Edward Arnold.
- Humaedi, M. Alie. (2004). *Dari Tradisionalisme Santri ke Kapitalisme Tanda. Tesis. Magister Ilmu Religi dan Budaya*, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Jencks, Charles. (1984). *The Language of Post Modern Architecture*. New York: Rizzoli.
- Kuntowijoyo. (1994). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: UGM Press.
- Masyhuri. (1981). *Konflik Sosial di Kudus 1918: Terlibatnya Syarikat Islam di Kudus dalam Konflik Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: UGM Press.
- McKenzie. (1975). "The Ecological Approach to the Study of Human Community." Dalam R.E. Park, E.W Burgess, dan R.D. McKenzie (eds). *The City*. Chicago: University of Chicago Press.

-
- Nas, Peter J.M. (1993). *Kota di Dunia Ketiga: Pengantar Sosiologi Kota*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Media Indonesia. (2002). *Laporan Berita tentang Merebaknya Industri Retail di Kota-Kota Besar*. Artikel dimuat pada tanggal 2 Juni, hlm. 5.
- Meijer, Ernst (ed). (1987). *Everday Life: Leisure and Culture*. Tilburg: University of Tilburg Press.
- Pratiwo. (2004). *Simbol-simbol Kota*. Jakarta: KITLV-NIOD.
- Pemerintah Kabupaten Kudus. (1979). *Pedoman Rencana Induk Ibukota Kabupaten Dati II Kudus tahun 1980 s.d. 1998*. Kudus: BPS.
- . (2000). *Kabupaten Kudus dalam Angka tahun 1999*. Kudus: BPS.
- . (2001). *Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Tahun 2001-2005*. Kudus: Setda Pemerintah Kabupaten Kudus.
- Sudrajat, Iwan. (2000). Diskursus Posmodernisme Seorang Geografer Marxis. *Basis* No 01-02, tahun ke-49.
- Sumanto. (2004). *Arus Cina Islam Jawa: Bongkar Sejarah atas Peranan Tionghoa dalam Penyebaran Agama Islam di Nusantara abad XV dan XVI*. Yogyakarta: Inspeal.
- Tamzil, M. (2003). *Visi Misi Pembangunan Kabupaten Kudus 2003 – 2008*. Kudus: Sekretaris Daerah.
- Tim Museum Kretek. (1987). *Sejarah Industri Rokok Kudus*. Kudus: Menara.
- Wertheim, W.F. (1959). *Indonesian society in transition: A study of social change*. 's-Gravenhage: Van Hoeve.
- Yunus, Hadi Sabari. (2002). *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Pusataka Pelajar.